

ABSTRAK

Perdagangan jasa merupakan salah satu bentuk perdagangan yang didukung dan dilindungi oleh *World Trade Organization* (WTO) melalui *General Agreement on Trade in Services* (GATS). Indonesia mulai mengikatkan diri dalam WTO dan GATS sejak tahun 1994. Sebagai salah satu anggota WTO dan GATS, Indonesia wajib mendukung cita-cita liberalisasi perdagangan jasa di berbagai sektor, salah satunya sektor pendidikan tinggi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis implementasi GATS pada penyelenggaraan jasa tenaga pengajar asing di institusi pendidikan tinggi di Indonesia dan bagaimana implementasi tersebut berdampak pada pengaturan penyelenggaraan jasa tenaga pengajar asing pada institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif. Penelitian ini meneliti bahan pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini pun menggunakan metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan konkrit mengenai implementasi GATS. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia belum memenuhi komitmennya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GATS di sektor pendidikan tinggi, khususnya yang menyangkut penyelenggaraan jasa tenaga pengajar asing, secara penuh. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menetapkan batasan-batasan yang lebih jelas dalam perdagangan jasa di sektor pendidikan tinggi, khususnya yang menyangkut mode 4 yaitu *movement of natural persons* dan mengkaji ulang peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersifat menghambat jalannya perdagangan jasa di sektor pendidikan tinggi dan menyesuaikan ketentuan-ketentuan tersebut dengan kebutuhan pembangunan.

Kata Kunci: WTO, GATS, Pendidikan Tinggi, *Movement of Natural Persons*

ABSTRACT

Trade in services is a form of trade that is supported and protected by the World Trade Organization (WTO) through the General Agreement on Trade in Services (GATS). Indonesia began to bind itself in the WTO and GATS since 1994. As a member of the WTO and GATS, Indonesia is obliged to support the ideals of liberalizing trade in services in various sectors, one of which is the higher education sector. The purpose of this research was to find out and analyze the implementation of GATS in the provision of foreign teaching staff services at higher education institutions in Indonesia and how this implementation has an impact on the regulation of foreign teaching staff services at higher education institutions in Indonesia. This research was structured using a normative judicial research method that focused on examining the application of the principles of positive law. This study examined library materials using statutory approaches. This study also used a qualitative analysis method which aimed to provide a concrete explanation regarding the implementation of GATS. The results showed that Indonesia has not fully fulfilled its commitment to the implementation of the GATS principles in the higher education sector, particularly those concerning the foreign teaching staff services. Therefore, the Government needs to establish clearer boundaries in trade in services in the higher education sector, especially regarding trade in services within mode 4, namely movement of natural persons. Moreover, the Government also needs to start reviewing any laws and regulations that may impede the course of trade in services in the higher education sector and adjust these provisions according to the needs of development.

Keywords: *WTO, GATS, Higher Education, Movement of Natural Persons*